

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks, kronis dan bersifat multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dimanfaatkan untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dan tidak berkualitas dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya ketrampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan structural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, akan tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, akan tetapi permanen dan berkelanjutan (Ala, Andre Bayo, (editor), 1996.).

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan ; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan ; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat untuk menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Abe, Alexander. 2001).

Bappenas. (1993:15) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah dan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2013, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen),

berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen). Selama periode September 2012-Maret 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta orang pada September 2012 menjadi 10,33 juta orang pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,35 juta orang (dari 18,09 juta orang pada September 2012 menjadi 17,74 juta orang pada Maret 2013). Selama periode September 2012-Maret 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2012 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,39 persen pada Maret 2013. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 14,70 persen pada September 2012 menjadi 14,32 persen pada Maret 2013. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2013 tercatat sebesar 73,52 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50 persen. (<http://www.bps.go.id/?news=1023> diakses pada tanggal 15 April 2012).

Penanganan kemiskinan tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan, sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan si miskin. Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu dan tetap ditindaklanjuti serta disempurnakan implementasinya adalah

perluasan akses kredit pada masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pembudayaan entrepreneurship.

Menurut Kiyosaki (2000) dalam Effendi (2006:39), mobilisasi pemikiran telah banyak ditempuh oleh para cendekiawan dengan penyelidikannya yang tekun telah berlangsung kurun abad dengan pengorbanan dana triliunan dolar dan telah menghasilkan konsep yang rumit-rumit dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan meratakan pembangunan dalam skala nasional maupun global. Bahkan pada kenyataannya penanggulangan kemiskinan semakin jauh dari harapan dan cenderung masih memperlihatkan kepincangan antara yang kaya dengan yang miskin, bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin tidak sehat dan rapuh, yang kaya semakin kaya dan kuat, sedangkan yang miskin semakin melarat.

Kondisi tersebut menurut Alfinn, dkk (2007:104) merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari penciptaan stabilitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini bukan saja merupakan tanggungjawab dari pemerintah, akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama, dalam hal ini merupakan kewajiban moral

serta menjadi amanat konstitusi dimana dalam implementasinya tidak hanya ditangani oleh pemerintah saja akan tetapi melibatkan semua komponen ataupun elemen bangsa.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mandiri dan handal sebagai salah satu usaha yang berasas manfaat guna menanggulangi serta memperkecil angka kemiskinan , diperlukan upaya yang lebih nyata berdasarkan pada prinsip pemberdayaan sehingga tumbuh dan berkembang program usaha yang tidak hanya meningkatkan produksi, akan tetapi lebih mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang semakin baik, merata dan berkualitas.

Dana bergulir adalah dana yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang mempunyai usaha, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan persyaratan yang disepekati oleh peminjam pada pengelola, dimana banyak anggota kelompok peminjam sering terlambat membayar cicilan setiap bulan, ini disebabkan karena banyak anggota kelompok peminjam tidak memiliki usaha sehingga anggota tersebut sulit membayar cicilan setiap bulan. Hal ini menjadi beban dari kelompok peminjam itu sendiri. Sehingga dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok peminjam lain.

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut, maka secara langsung atau tidak langsung pemerintah mengambil kebijakan program dana bergulir pada koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir . Pola bergulir adalah

cara memanfaatkan bantuan kepada koperasi dan usaha kecil menengah. Tata cara atau persyaratannya diatur dalam keputusan Menteri KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah). Pola perguliran ini di mulai tahun 2000 dan merupakan salah satu terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka menstimulir pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM. (Departemen Koperasi 1999)

Dari latar belakang di atas diperoleh gambaran permasalahan yakni apakah masyarakat bisa diberdayakan melalui Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program dana Bergulir ? Secara sederhana jawaban dari permasalahan tersebut, memotivasi peneliti untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut melalui suatu penelitian yang berjudul: **“Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Bergulir Pada Koperasi Kasih Ibu dan UKM di kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Bergulir pada Koperasi Kasih Ibu dan UKM di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir pada Koperasi Kasih

Ibu dan UKM di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri atas :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Sebagai implementasi pengembangan profesi bagi peneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Bergulir pada Koperasi Kasih Ibu dan UKM dalam meningkatkan kemandirian masyarakat menuju Pendidikan Luar Sekolah yang berkualitas.
- b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lanjut yang ingin mengembangkan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan potensinya dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program dana Bergulir pada Koperasi Kasih Ibu dan UKM.
- b) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemandiriannya melalui program dana bergulir pada Koperasi Kasih Ibu dan UKM, agar memiliki kekuatan kreatif, sehingga mampu melakukan sesuatu, memecahkan masalah, bekerja membangun keterampilan dan pengetahuan.